

**ANALYSIS OF PUBLIC PERCEPTION OF THE ROLE OF THE
REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY (BPBD) IN
FOREST FIRE CONTROL (KARHUTLA CASE STUDY IN SALO
VILLAGE OF SALO DISTRICT OF KAMPAR REGENCY OF RIAU
PROVINCE 2019)**

Anggi Nabila Balqis, Hambali, Jumili Arianto

Email: anggi.nabila1512@student.unri.ac.id, hambali@lecturer.unri.ac.id,
jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id
Phone number: 082171968320

*Pancasila and Civic Education Study Program
Social Science Education
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *This research is motivated by the natural disaster of forest fires that occurred in the village of Salo subdistrict of Kampar District of Riau Province which occurred in 2019 even though there was already a (BPBD) tasked with controlling and preventing natural disasters that occurred in Kampar district. In carrying out regional disaster management there are tasks that must be carried out by BPBD. The formulation of the problem in this study is "What is the public perception of the role of the (BPBD) in the control of forest fires in Salo Village of Salo District of Kampar Regency of Riau Province 2019". The purpose of this study is to find out the public's perception of the role of the (BPBD) in the control of forest fires in Salo Village, Salo District, Kampar Regency, Riau Province. This research method is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews consisting of 10 questions and questionnaires consisting of 10 questions. The subjects in this study were the entire salo village community of 2,060 heads of families. Determination of purposive sampling technique research sample with the number of samples as many as 30 people of Salo village community. The result of this study is that public perception of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) is very good. This is seen from the results of the spread of questionnaires with the percentage of respondents' answers, which is 82% which proves that the Role of the Daerah Disaster Management Agency (BPBD) in Forest Fire Control is very important. In line with the results of interviews to 30 respondents who stated that the Role of the (BPBD) in Forest Fire Control is currently Very Good.*

Key Words : *Community Perception, BPBD, Forest Fires.*

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN (STUDI KASUS
KARHUTLA DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN
KAMPAR PROVINSI RIAU 2019)**

Anggi Nabila Balqis, Hambali , Jumili Arianto

Email: anggi.nabila1512@student.unri.ac.id , hambali@lecturer.unri.ac.id ,
jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id
Nomor Handphone: 082171968320

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bencana alam kebakaran hutan yang terjadi di desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang terjadi pada tahun 2019 padahal sudah ada (BPBD) yang bertugas untuk mengendalikan dan mencegah bencana alam yang terjadi di kabupaten Kampar. Dalam melakukan penanggulangan bencana daerah terdapat tugas-tugas yang harus dijalankan oleh BPBD. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran (BPBD) dalam pengendalian kebakaran hutan di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau 2019”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap peran (BPBD) dalam pengendalian kebakaran hutan di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terdiri dari 10 pernyataan dan angket yang terdiri dari 10 pernyataan. Subjek dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat desa Salo yang berjumlah 2.060 kepala keluarga. Penentuan sampel penelitian Teknik Purposive Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang masyarakat desa Salo. Hasil penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat terhadap (BPBD) Sangat Baik. Hal terlihat dari hasil penyebaran angket dengan besaran persentase jawaban responden yaitu sebesar 82% yang membuktikan bahwa Peran (BPBD) dalam Pengendalian Kebakaran Hutansangatlah penting. Sejalan dengan hasil wawancara kepada 30 responden yang menyatakan bahwa peran (BPBD) dalam Pengendalian Kebakaran Hutan saat ini sudah Sangat Baik.

Kata Kunci :Persepsi Masyarakat, (BPBD), Kebakaran Hutan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara tropis, yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Hal ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan mengingat hutan merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam, karena dilihat dari manfaatnya sebagai paru-paru dunia, erosi, banjir dan dapat menjaga kesuburan tanah (Suryaningsih, 2012).

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara, keterlibatan Negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, lestari, bagi kesejahteraan masyarakat (Lahijie, 2011).

Pemanfaatan hutan dan perlindungan hutan juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian Hutan, Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan beberapa keputusan menteri kehutanan. Peratutan terbaru dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Peraturan yang ada tidak membuat pengelolaan hutan dilaksanakan dengan baik. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia merupakan permasalahan yang rutin terjadi setiap tahun khususnya pada musim kemarau. Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan selama ini tidak memperhatikan manfaat yang akan diperoleh dari keberadaan hutan tersebut sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Penyebab utama kerusakan hutan adalah kebakaran hutan. Polusi asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara terutama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Karakteristik karhutla di Indonesia sangat spesifik karena sebagian besar berada di lahan gambut yang sangat potensial menimbulkan asap. Kebakaran lahan dan hutan pada umumnya disebabkan oleh ulah manusia (99%), yaitu pada saat mereka melakukan penyiapan lahan untuk perladangan, pertanian, dan perkebunan dengan cara membakar; suatu cara yang mudah, murah, dan cepat (BNPB, 2020).

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, 2020. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi momok menakutkan bagi masyarakat setiap tahunnya. Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau sebagai penyumbang kebakaran hutan. setiap tahun Kabupaten Kampar tidak pernah absen sebagai penyumbang kebakaran hutan dan lahan. Beberapa tahun belakangan di Kabupaten Kampar yakni 2016-2019 kebakaran hutan menjadi semakin meningkat setiap tahunnya. banyak wilayah-wilayah hutan kabupaten Kampar yang terbakar dan sengaja dibakar. Pada tahun 2016 luas hutan yang terbakar 43 hektare, ditahun 2017 hutan Kampar yang terbakar seluas 67 hektare, ditahun 2018 luas hutan yang terbakar

seluas 127 hektare dan yang paling parah yaitu tahun 2019, hutan yang terbakar seluas 225 hektare. Peningkatan kebakaran hutan ini tentunya menjadi problem yang harus diselesaikan, karena kebakaran hutan dan lahan ini meningkat pesat setiap tahunnya.

Salah satu daerah yang ada di Kabupaten Kampar yang mengalami kebakaran hutan adalah Desa Salo Kecamatan Salo. Kasus kebakaran hutan sering terjadi di desa ini. Pada tahun 2019, Desa Salonge merupakan satu dari desa yang ada di Kecamatan Salo yang berpotensi besar terjadi kebakaran lahan. Kebakaran hutan yang terjadi di Desa Salo memberikan dampak yang cukup besar bagi kerugian manusia baik materiil maupun imateriil. Pemerintah telah berupaya keras menyelesaikan permasalahan ini baik melalui dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan, maupun dukungan pendanaan. Namun realitanya kejadian ini masih berulang sepanjang tahun.

Berdasarkan berita yang dikutip dari Riaupos.com (2019) bahwa Kebakaran lahan terjadi di Desa Salo Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, pada Senin 16 September 2019, Api membakar lahan yang berisi pohon karet milik warga setempat. Kebakaran sempat membuat warga histeris, karena lokasi kebakaran tepat berada di belakang salah satu rumah warga. Upaya penanggulangan kebakaran hutan telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, namun kebakaran hutan tetap semakin meningkat setiap tahunnya. Tentunya masalah kebakaran hutan ini sudah sangat memperhatikan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-April 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu dan random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara acak dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang masyarakat desa Salo yang telah dipilih berdasarkan kreteria tertentu.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, kuesioner (angket), dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mendapatkan data secara langsung mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Terhadap Peran BPBD Dalam Pengendalian Karhutla. Wawancara dilakukan dengan informan, agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas terhadap masalah yang diteliti oleh peneliti. Kuesioner (angket) untuk memperoleh jawaban responden melalui pertanyaan yang telah disediakan berdasarkan variabel dalam penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini, berupadata-data yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Kampar dan studi literatur yang mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data deskriptif. Analisis data kualitatif terdiri dari: (1) Pengumpulan data (2) Reduksi data (3) Penyajian data, dan (4) Penarikan kesimpulan. Sedangkan Teknik analisis data deskriptif digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat Suku Talang Mamak terhadap pendidikan formal yang diukur menggunakan angket, dianalisis dengan menjumlahkan skor jawaban yang didapat. Kemudian data yang diperoleh dari kuesioner diolah dalam bentuk tabulasi data frekuensi. Tabulasi data adalah penyajian

data dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam pengamatan. Kemudian dianalisis dan memberi penjelasan atas data yang diperoleh. Adapun teknik analisis data deskriptif digunakan

rumus presentase Anas Sudjono. (2012) yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penyebaran angket (kuesioner) pada penelitian ini maka diperoleh rekapitulasi jawaban responden berdasarkan sub indikator yaitu :

Table 1. Rekapitulasi keseluruhan angket tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dalam pengendalian kebakaran hutan (studi kasus karhutla di desa salo kecamatan salo)

No	Alternatif Jawaban								N
	SB		B		KB		TB		
	F	%	F	%	F	%	F	%	
1.	20	66,67	8	26,67	2	6,66	0	0	30
2.	8	26,67	16	53,33	6	20	0	0	30
3.	13	43,33	14	46,67	3	10	1	3,33	30
4.	12	40	13	43,33	5	16,67	0	0	30
5.	14	46,67	12	40	4	13,34	0	0	30
6.	8	26,67	16	53,33	6	20	0	0	30
7.	7	23,33	15	50	8	26,67	0	0	30
8.	15	50	9	30	6	20	0	0	30
9.	8	26,67	17	56,66	3	10	2	6,67	30
10.	10	33,33	11	36,67	3	10	6	20	30
Juml	115	383,34	131	436,66	46	153,34	9	30	300
ah									
Rata	11,5	38,33	13,1	43,67	4,6	15,33	0,9	3	100
-									
Rata									

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan hasil rekapitulasi tabel 1. tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dalam pengendalian kebakaran hutan (studi kasus karhutla di desa Salo kecamatan Salo) dapat diketahui responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 38,33%, menjawab “Baik” sebanyak 43,67%, menjawab “Kurang Baik” sebanyak 15,33%, dan menjawab “Tidak Baik” sebanyak 3%.

Berdasarkan tolok ukur tersebut diketahui responden menjawab sangat setuju + responden menjawab setuju yaitu 38,33% + 43,67% = 82%. Hasil rekapitulasi tersebut pada kategori A pada rentang 75.01% - 100% = Sangat Baik Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dalam pengendalian kebakaran hutan (studi kasus karhutla di desa salo kecamatan salo) Sangat Baik.

Sedangkan hasil wawancara dalam penelitian ini bersama 30 orang masyarakat desa Salo adalah sebagai berikut:

1. BPBD sudah menetapkan pedoman terhadap usaha penanggulangan bencana?

Sebanyak 20 orang responden berpendapat bahwa:

“Sebagian responden menjawab bahwa BPBD sudah mempunyai pedoman dalam penanggulangan bencana di desa Salo, BPBD sudah melakukan usaha penanggulangan bencana yang ada di desa salo dengan tim yang sudah dibentuk sesuai kebutuhan dan jenis bencana yang terjadi.

Sebanyak 2 orang responden berpendapat bahwa :

“Masih ada Sebagian masyarakat desa Salo yang belum mengetahui mengenai BPBD, seperti apa saja pedoman yang dimiliki oleh BPBD untuk melakukan penanggulangan bencana daerah dan ada juga yang tidak tau apa saja pedoman yang dimiliki oleh BPBD”

Sementara 8 orang lainnya berpendapat :

“ BPBD sudah menetapkan pedoman penanggulangan bencana dengan baik dan yakin BPBD sudah mempunyai pedoman penanggulangan bencana untuk desa Salo”.

Berdasarkan hasil wawancara dari penjelasan angket penelitian di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat desa Salo berpendapat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah memiliki dan menetapkan pedoman terhadap usaha penanggulangan bencana di desa Salo. Sebagai Lembaga resmi dari pemerintahan yang ditugaskan untuk melakukan penanggulangan bencana di daerah yang telah ditugaskan, BPBD tentu sudah mempunyai pedoman yang telah ditetapkan untuk melaksanakan usaha penanggulangan bencana dengan baik. Seperti alasan yang disampaikan oleh salah satu informan bahwa beliau pernah mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh BPBD kabupaten kampar di desa mereka yang juga disampaikan mengenai pedoman kerja dari BPBD.

2. BPBD sudah menetapkan standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan

Sebanyak 16 responden berpendapat bahwa :

“ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Kampar sudah menetapkan standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Sebanyak 8 responden memberi tanggapan :

“Sejauh ini BPBD sudah melakukan penanggulangan bencana yang ada di kabupaten Kampar terutama di desa salo dengan sangat baik”

Sementara pendapat dari 6 dari responden menyatakan :

“Kurang paham dan tidak tau pasti apakah sudah berdasarkan undang-undang standarisasi yang dimiliki oleh BPBD dalam menjalankan tugas sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan tidak mengetahui sama sekali seperti apa standarisasi BPBD, tidak paham aturan perundang-undangan”

Berdasarkan hasil jawaban dari penjelasan angket penelitian di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat desa Salo berpendapat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah menetapkan standarisasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia.

2. BPBD sudah Menyusun prosedur dalam Menyusun dan menetapkan peta rawan bencana

Sebagian besar responden menyatakan bahwa

“BPBD sudah Menyusun prosedur peta rawan bencana sebagai gambaran untuk melaksanakan penanggulangan bencana daerah untukantisipasi ketika potensi bencana terlihat tentu akan lebih mudah jika sudah memiliki peta yang sudah disusun sebelumnya mengenai daerah mana saja yang rawan terjadi bencana alam karena BPBD tentu sudah mempunyai prosedur dalam Menyusun peta daerah yang rawan akan bencana sesuai dengan aturan yang ada di BPBD itu sendiri”

Sebanyak 14 orang responden memberikan pendapat :

“BPBD sudah menjalankan tugas dengan baik dan menetapkan peta rawan bencana yang ada di desa Salo dengan baik sesuai tugas BPBD”

Sementara 3 orang lainnya berpendapat :

“Tidak mengetahui bagaimana prosedur dan taraf ukur BPBD untuk menetapkan sebuah daerah sebagai daerah rawan bencana pada peta rwan bencana BPBD serta kurang paham terhadap hal tersebut”.

Berdasarkan hasil jawaban dari penjelasan angket penelitian di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat desa Salo berpendapat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah menyusun prosedur untuk menyusun dan menetapkan peta rawan bencana sebagai acuan untuk mempermudah pekerjaan BPBD dan supaya daerah yang termasuk daerah rawan bencana yang dibuat pada peta sesuai dengan kriteria dan tepat sasaran.

4. BPBD melaksanakan kewajiban selain dari badan penanggulangan bencana

Sebanyak 12 orang responden berpendapat :

“BPBD sudah menjalankan kewajiban mereka dengan sangat baik.”

Sebanyak 13 reseponden berpendapat :

“Berdasarkan pengalaman warga BPBD pernah membantu masyarakat yang bekerja sama dengan pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran yang terjadi tempat tinggal warga”

Sementara 5 responden lainnya berpendapat :

“ Tidak tau apa saja kewajiban lain BPBD selain menanggulangi bencana”.

Berdasarkan hasil jawaban dari penjelasan angket penelitian di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat desa Salo berpendapat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah melaksanakan kewajiban selain dari badan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilapangan dan anggota yang tersedia di BPBD.

5. BPBD dapat mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten

Sebanyak 14 responden berpendapat :

“Selama BPBD ada di kabupaten Kampar belum pernah ada masalah seperti korupsi di BPBD berarti BPBD dapat mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima oleh BPBD selama ini”

Sebanyak 12 responden menyatakan :

“Rata-rata masyarakat desa Salo dapat mempertanggung jawabkan anggaran yang telah diamanahkan kepada BPBD dan yakin sudah dilakukan dengan baik oleh BPBD”

Sementara 4 Responden lainnya menyatakan :

“Belum pernah menyaksikan secara langsung maupun di berita atau media proses pertanggung jawaban tersebut”.

Berdasarkan hasil jawaban dari penjelasan angket penelitian di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat desa Salo berpendapat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Kampar dapat mempertanggung jawabkan anggaran yang diterima dari penda kabupaten Kampar karena BPBD mempunyai laporan pertanggung jawaban terhadap dana yang telah dipergunakan selama masa jabatan pejabat yang bersangkutan sebagai Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD).

6. BPBD sudah mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang

Sebagian besar responden (16 orang) menyatakan :

“Masyarakat yakin BPBD sudah melakukan semuanya dengan sangat baik”

Sebanyak 8 responden menyatakan :

“Menurut warga desa Salo sudah dilakukan dengan sangat baik berdasarkan pengalaman yang telah dialami dan disaksikan sendiri oleh masyarakat”

Sementara 6 responden lainnya menyatakan :

“Tidak tau mengenai pengendalian uang yang dilakukan BPBD.”

Berdasarkan hasil jawaban dari penjelasan angket penelitian di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat desa Salo berpendapat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah BPBD dapat mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang sesuai dengan tugas BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana.

7. BPBD sudah melaksanakan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana

Setengah dari responden menyatakan :

“BPBD sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya termasuk untuk melaksanakan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana alam yang ada di setiap daerah termasuk desa mereka”

Sebanyak 8 responden menyatakan :

“Tidak bisa memberikan kepastian mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD”

Sementara 7 responden menyatakan :

“BPBD sudah melaksanakan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di desa Salo dengan sangat baik dan masih berjalan sampai sekarang.”

Berdasarkan hasil jawaban dari penjelasan angket penelitian di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat desa Salo berpendapat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah melaksanakan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan sangat baik. BPBD melaksanakan proses-proses tersebut sesuai dengan kebutuhan pada peta daerah rawan bencana.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi keseluruhan pengolahan data angket yang disebar kepada 30 responden diketahui responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 38,33%, menjawab “Baik” sebanyak 43,67%, menjawab “Kurang Baik” sebanyak 15,33%, dan menjawab “Tidak baik” sebanyak 3%. Berdasarkan tolak ukur tersebut diketahui responden menjawab sangat Baik + responden menjawab Baik yaitu $38,33\% + 43,67\% = 82\%$. Hasil rekapitulasi tersebut pada kategori A pada rentang $75.01\% - 100\% =$ Sangat Baik.

Selanjutnya peneliti menganalisa dari penjelasan pada angket yang diisi oleh 30 orang warga desa Salo yang bertujuan untuk meyakinkan hasil pengolahan data angket yang disebar kepada masyarakat desa Salo. Dari hasil penjelasan angket tersebut dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap peran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Sangat baik, saat ini masyarakat desa Salo telah banyak mengetahui bagaimana BPBD melaksanakan tugas dalam menanggulangi bencana daerah yang ada di desa Salo. Mulai dari memiliki dan penetapan pedoman terhadap usaha penanggulangan bencana, menetapkan standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun prosedur dalam menyusun dan menetapkan peta rawan bencana, melaksanakan kewajiban lain dari badan penanggulangan bencana Daerah.

Menurut masyarakat desa Salo selama ini BPBD telah melaksanakan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan disetiap daerah pada peta rawan bencana dimana proses tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan terus berlanjut hingga saat ini. Salah satu proses yang dilakukan BPBD adalah dengan melaksanakan penyuluhan penanggulangan bencana di desa Salo yaitu dengan mengadakan penyuluhan di kantor desa salo dengan mengumpulkan masyarakat di kantor desa, selain itu BPBD juga melakukan penyuluhan secara individu kepada masyarakat desa salo dengan mendatangi masyarakat yang ada dilahan duntuk diberi pemahaman bahaya bencana alam dan mencegah terjadinya benacan dengan merawat alam seta tidak membakar sembarangan dilahan maupun hutan. BPBD juga telah menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kebutuhan dan ketetapan dari BPBD. BPBD telah memiliki dan menetapkan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana di kabupaten Kampar termasuk di desa Salo sesuai dengan perauran perundang-undangan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya serta teratur sesuai tugas dan fungsi BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana daerah.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan dengan judul Analisis “Persepsi Masyarakat Terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan (Studi Kasus Karhutla Di Desa Salo Kecamatan Salo kabupaten Kampar Provinsi Riau 2019)”. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Sangat Baik. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penyebaran angket dengan besaran persentase jawaban responden yaitu sebesar 82% dimana persentase terbanyak yaitu pada pernyataan BPBD telah memiliki dan menetapkan pedoman terhadap usaha penanggulangan bencana masyarakat desa Salo menjawab sangat baik sebanyak 20 responden dengan persentase 66,67%, Baik sebanyak 8 responden dengan persentase 26,67%, Kurang Baik 2 responden dengan persentase 6,67% dan Tidak Baik 0 responden. Sedangkan pernyataan dengan persentase paling rendah adalah BPBD telah memiliki dan menetapkan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana dengan perolehan persentase Sangat Baik 10 responden dengan persentase 33,33%, Baik 11 responden dengan persentase 36,67%, Kurang Baik 3 responden dengan persentase 10% dan Tidak Baik 6 responden dengan persentase 20%. Membuktikan bahwa peran BPBD dalam pengendalian kebakaran sangat baik. Hal ini sejalan dengan hasil olah data penjabaran jawaban responden yang menyatakan bahwa peran BPBD dalam pengendalian kebakaran hutan di desa Salo saat ini sudah Sangat Baik, hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana yang ada di desa Salo yang dirasakan manfaatnya dengan sangat baik oleh masyarakat desa Salo.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar agar selalu cepat dan tepat dalam menjaga prinsip badan penanggulangan bencana .
2. Lebih menyeluruh dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
3. Lebih terbuka kepada masyarakat tentang aturan dan arahan yang dimiliki BPBD terhadap penanggulangan bencana daerah di kabupaten Kampar.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
4. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Jumili Arianto, S.Pd., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini
5. Dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan, Drs, Ahmad Eddison, Bapak Separen, S.Pd, M.H dan Bapak Supentri, MPd
6. Bapak Dr. Hambali, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP., M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd., M.H, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Haryono, M.Pd , Separen, S.Pd., M.H, Bapak Indra Primahardani, MH., Bapak Mirza Hardian, M.Pd dan Ibu Hariyanti, M.Pd selaku dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
7. Teristimewa dan paling utama kepada kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Zubir Chan dan Ibunda serta semua keluarga besar atas dukungan dan pengorbanan selama ini, kasih sayang, semangat dan selalu mendoakan penulis. Pengorbanan mereka begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anas, Sudjono. 2012. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, 2020.

Lahijie, M. Abubakar. 2011. *Ekoforestri dalam Panduan Hutan Lestari*. Samarinda: Universitas Mulawarman.

Suryaningsih, H. (2012). Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu Bayi dan Balita ke Posyandu di Puskesmas Kemiri Muka Kota Depok Tahun 2012.[Skripsi] Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

BNPB. 2012. Data dan Informasi Bencana Indonesia. <http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/showdatacard.jsp?clave=2900&nStart=0>, (diakses tanggal 6 Desember 2020).

Riaupos.com. 2019. Warga Histeris, Kebakaran Terjadi Dekat Permukiman di Kampar <https://riaupos.jawapos.com/kampar/16/09/2019/208815/warga-histeris-kebakaran-terjadi-dekat-permukiman-di-kampar.html>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2020).